

PENGARUH BELANJA MODAL DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Luh Triska Widiani¹
Sudarsana Arka²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: triskawidiani7@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali menggunakan sembilan kabupaten/kota, dengan rentang waktu tahun 2011 hingga 2018. Ukuran sampel sebanyak 72 pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dengan *cross section*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur/path untuk menganalisis pengaruh langsung dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh tidak langsung. Berdasarkan analisis jalur, hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel belanja modal, investasi swasta dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sementara itu, kesempatan kerja memediasi pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: belanja modal, investasi swasta, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of capital expenditure and private investment on employment opportunities and the welfare of district / city communities in Bali Province. This research was conducted in Bali Province using nine regencies / cities, with a span of years from 2011 to 2018. The sample size was 72 observations by combining time series data with cross sections. This study uses path analysis techniques to analyze direct effects and multiple tests to analyze indirect effects. Based on the path analysis, the results of the study concluded that the capital expenditure variable has a positive but not significant effect on employment opportunities and private investment has a positive and significant effect on district / city employment opportunities in the Province of Bali. Variable capital expenditure, private investment and employment opportunities have a positive and significant impact on the welfare of district / city communities in Bali Province. The results showed that employment opportunities did not mediate the effect of capital expenditure on the welfare of district / city communities in Bali Province, meanwhile, employment opportunities mediated the effect of private investment on the welfare of dittrict / city communities in Bali Province.

Keywords: capital expenditure, private investment, employment opportunities, community welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murwanto, 2014). Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari SDGs dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (Putra dan Ulupui, 2015). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah IPM. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan harapan dari setiap pemerintah pusat maupun daerah (Suryahadi dkk, 2012). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja

untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksirpotensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Azhar, 2004: 298).

Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012). IPM merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk rangking kesejahteraan suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan konsep yang mempertimbangkan aspek dalam menopang hidup yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hukom,2014).

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia Menurut Provinsi (2019), menyatakan bahwa Provinsi Bali meraih peringkat ke 5 (lima) dari 33 Provinsi dengan nilai IPM tahun 2010-2018 sebesar 72,57. Peringkat 1 (satu) diraih oleh DKI Jakarta dan selanjutnya DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Sedangkan, Provinsi yang memiliki nilai IPM terendah tahun 2010-2018 adalah Papua. Hal tersebut disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan di Indonesia bagian timur karena ketimpangan antar wilayah. Kondisi tersebut secara empiris ditentukan oleh fluktuasi belanja langsung yang dialokasikan. Angka IPM yang tinggi dapat menunjukkan keberhasilan meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup yang layak (Rustariyuni, 2018). Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat adalah otonomi daerah, yaitu melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri guna mengatasi masalah-masalah ketimpangan antar daerahnya.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, Peran pemerintah sang penting dalam pembentukan kebijakan (Tahiri, 2017). Sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Bali tentu saja harus berupaya melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengoptimalkan peran dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Terjadi perbedaan yang pada nilai IPM pada 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. IPM Bali secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, namun perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Provinsi Bali menjadi suatu masalah yang penting untuk diatasi. Perbedaan tersebut menunjukkan terjadi ketidakmerataan antar daerah (Melliana dan Zain, 2013). Angka IPM kabupaten/kota Provinsi Bali ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2018 (dalam poin)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65
Tabanan	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45
Badung	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87
Gianyar	72,50	73,36	74	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61
Klungkung	67,01	67,64	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90
Bangli	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96
Karangasem	61,60	62,95	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49
Buleleng	67,73	68,29	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70
Denpasar	79,77	80,45	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30
Bali	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77

*Sumber:*BPS Provinsi Bali, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari 70,87 pada tahun 2011 menjadi 74,77 pada tahun 2018. IPM Provinsi Bali tercermin dari sebgaaian besar kabupaten/kota memiliki nilai IPM antara 70 sampai 80. Maka dari itu, IPM Provinsi Bali pada tahun 2017 menduduki peringkat lima tertinggi pada level nasional (Balipost, 2019). Rentangan IPM yang dikategorikan menengah ke atas hanya dimiliki oleh tiga kabupaten/kota di Bali yaitu

Denpasar, Badung dan Gianyar. Angka IPM yang tinggi dapat menunjukkan keberhasilan meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup yang layak (Rustariyuni, 2018). Meningkatnya IPM tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi, melainkan berbagai aspek pembangunan (Ardiansyah dan Vitalis, 2014).

Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Banyak negara maju telah mencapai banyak pembangunan ekonomi dan sosial dengan berinvestasi dalam pengetahuan dan teknologi, tren ini harus dipertimbangkan dengan mengembangkan ekonomi dalam menentukan prospek strategis mereka dalam arah transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan (Kaur dan Singh, 2016).

Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan di beberapa negara, dalam mencapai tujuannya guna meningkatkan pembangunan manusia terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya pemerataan distribusi, pengalokasian

anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek pendidikan dan kesehatan (Wijayanti dan Darsana, 2015).

Peranan pemerintah dalam proses pembangunan di suatu daerah sangat penting (Nurudeen dan Usman, 2010). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Janina, 2007). Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hendamin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IPM, faktor-faktor tersebut di antaranya belanja modal pemerintah dan investasi swasta.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana-prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi serta merangsang pihak swasta untuk berinvestasi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, dalam mengoperasikan tata kelola pemerintah tentu diperlukan pegawai negeri, dalam sisi lainnya perluasan faktor produksi (investasi) akan membesar skala penyerapan tenaga kerja, hal – hal tersebut sangat memungkinkan dalam pengentasan pengangguran, dan memungkinkan lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan tantangan utama pembangunan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan.

Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010). Kebijakan Investasi yg dapat dilakukan baik oleh pihak swasta dan oleh pemerintah berdampak positif pada kesejahteraan (Bappenas, 2011). Pendapat tersebut didukung hasil penelitian (Suciati dan Budhi, 2014) terjadi pengaruh positif antara jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat (IPM). Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada suatu daerah (Sudibia dan Adipuryanti, 2015).

Adanya peningkatan ekonomi akibat investasi menyebabkan kebutuhan tenaga kerja akan meningkat dalam rangka menghasilkan output yang meningkat (Wahyuni, 2014). Meningkatnya output akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional sehingga pada akhirnya taraf kemakmuran masyarakat juga meningkat. Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitumenciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Sucitrawati dan Arka, 2014). Investasi memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penyerapan tenaga kerja demi mengurangi tingkat pengangguran (Manuaba dkk, 2016).

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi (Adnan dan Prasetyo, 2010). Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga

mendapat perhatian dan penekanan yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi sangat berperan penting didalam pembangunan ekonomi suatu daerah dimana investasi asing dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Prayuda dan Dewi, 2016).

Tingkat pengangguran suatu daerah dapat dilihat melalui kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnyadan tingkat pengangguran semakin menurun. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengijinkan investasi asing masuk ke dalam negeri tentunya dibawah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Lindblad, 2015).Pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi swasta sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi (Mentari dan Mahendra Yasa, 2016).

Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat (Dewi dan Purbadharmaja, 2013). Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Peranan pemerintah dalam proses pembangunan disuatu daerah sangat penting (Nurudeen dan Usman, 2010). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan

daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Hendamin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi IPM, faktor-faktor tersebut diantaranya belanja modal pemerintah dan investasi swasta. Pembangunan suatu daerah harus dimulai dari dalam, melalui investasi dan belanja modal pemerintah (Adams, 2009).

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana-prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi serta merangsang pihak swasta untuk berinvestasi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dan investasi swasta dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, hal tersebut sangat memungkinkan untuk banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan tantangan utama pembangunan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan.

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja (Asiri dkk, 2016). Penelitian Laksmi (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali” menjelaskan bahwa belanja modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Menurut Penelitian Lopian (2017) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Tahun 2006-2015)” menjelaskan bahwa

investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja yang juga mengurangi tingkat pengangguran di Kota Manado. Berbeda dengan penelitian Fatas dan Mihov (2001) menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah.

Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suciati dan Budhi (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997). Penelitian Diantari dan Wirathi (2017) yang berjudul “Pengaruh Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Melalui Pertumbuhan

Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Bali” menjelaskan bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Menurut penelitian Khan (1931) yang berjudul “*The Relation Of Home Investment To Unemployment*” menjelaskan bahwa peningkatan lapangan kerja diperlukan sehubungan dengan peningkatan investasi. Penelitian Irvan dan Karmini (2016) menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Laila dan Sri (2011) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” menjelaskan bahwa investasi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara.

Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah semestinya searah dengan meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. dalam penelitian Krismajaya dan Martini Dewi (2019) yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah Dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi” menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hendarmin (2012) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat” yang menyatakan bahwa variabel belanja modal pemerintah daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan variabel investasi swasta berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Fatas (2001) menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah. Penelitian Nina (2018) yang berjudul “Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali” menyatakan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Sita (2016) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Zebua (2014) dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Ketimpangan dapat diukur dengan rasio gini, memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Partowo, 2013). Dalam penelitian Adnan dan Prasetyo (2010) yang berjudul “*Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java*” menjelaskan bahwa investasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Investasi yang mewakili pembelian barang modal (capital stock) dan peralatan produksi untuk menggantikan dan terutama peningkatan barang modal dalam ekonomi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah kegiatan meningkatkan kapasitas menciptakan ekonomi yang baik, sehingga tingkat investasi menjadi salah satu penentu ekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian De Fretes (2007),

menyebutkan bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dimana dengan adanya peningkatan investasi swasta baik itu PMDN atau PMA akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan dapat membuka peluang lapangan kerja baru. Hasil penelitian Wihardjo (2014) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui belanja langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja maka semakin banyak luas kesempatan kerja (Esmara, 1986). Terciptanya kesempatan kerja yang luas, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk yang bekerja memperoleh pendapatan, dimana pendapatan merupakan unsur yang terdapat pada masyarakat yang sejahtera ditunjukkan melalui IPM. Terkait dengan kesempatan kerja, bahwa modal pemerintah dan investasi swasta melalui jalur kesempatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal ini berarti bila terjadi kenaikan kesempatan kerja maka akan meningkatkan IPM dan sebaliknya penurunan kesempatan kerja dapat menurunkan nilai IPM (Hendarmin, 2012). Penelitian Awandari dan Indrajaya (2016) yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja” menyatakan bahwa

kesempatan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Kesempatan Kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal, Investasi Swasta dan Kesempatan Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena di kabupaten/kota Provinsi Bali memiliki disparitas dalam kesejahteraan masyarakat melalui indikator IPM antar wilayah. Objek penelitian ini adalah belanja modal, investasi swasta, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Jumlah pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 (8 tahun) maka besarnya sampel adalah $9 \times 8 = 72$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi non perilaku. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi non perilaku, yaitu teknik pengamatan secara tidak langsung atau peneliti sebagai pengamat independen yang melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen pendukung.

Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Penelitian pengaruh belanja modal, investasi swasta terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y₁ : Kesempatan Kerja
- Y₂ : Kesejahteraan Masyarakat
- X₁ : Belanja Modal
- X₂ : Investasi Swasta
- e₁, e₂ : Error
- β₁, β₂, β₃, β₄, β₅ : Koefisien Regresi Untuk masing-masing Variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian pengaruh persamaan 1 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel belanja modal dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Persamaan regresi substruktural I sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,157X_1 + 0,533X_2 + e_1$$

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I:

Tabel 2.
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi	Koef. Standar	Reg. t hitung	P. Value / sig.	Keterangan
X ₁ → Y ₁	0,157	1,530	0,131	Tidak Signifikan
X ₂ → Y ₁	0,533	5,200	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

- X₁ = Belanja Modal
- X₂ = Investasi Swasta
- Y₁ = Kesempatan Kerja

F hitung menunjukkan angka sebesar $20.211 > F$ tabel 3,13 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $0,05 = \alpha$ (Sig < 0,05). Artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel belanja modal dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah layak (fit).

Persamaan regresi substruktural II:

Berdasarkan persamaan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel belanja modal, investasi swasta dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

$$Y_2 = 0,291X_1 + 0,198X_2 + 0,507Y_1 + e_2$$

Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II:

Tabel 3.
Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II

Regresi	Koef. Standar	Reg. t hitung	P. Value / sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,291	3,693	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,198	2,164	0,034	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,507	5,574	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

X_1 = Belanja Modal

X_2 = Investasi Swasta

Y_1 = Kesempatan Kerja

Y_2 = Kesejahteraan Masyarakat

F hitung menunjukkan angka sebesar $41.146 > F$ tabel sebesar 2,74 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $0,05 = \alpha$ (Sig < 0,05). Artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel belanja modal, investasi swasta dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah layak (fit).

Tabel 4.
Ringkasan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dan Pengaruh Total
Variabel Belanja Modal, Investasi Swasta, Kesempatan Kerja dan
Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hubungan Variabel	Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Y ₁	Total
X ₁ → Y ₁	0,157	-	0,157
X ₂ → Y ₁	0,533	-	0,533
X ₁ → Y ₂	0,291	(0,002)	0,293
X ₂ → Y ₂	0,198	(0,0005)	0,1985
Y ₁ → Y ₂	0,507	-	0,507

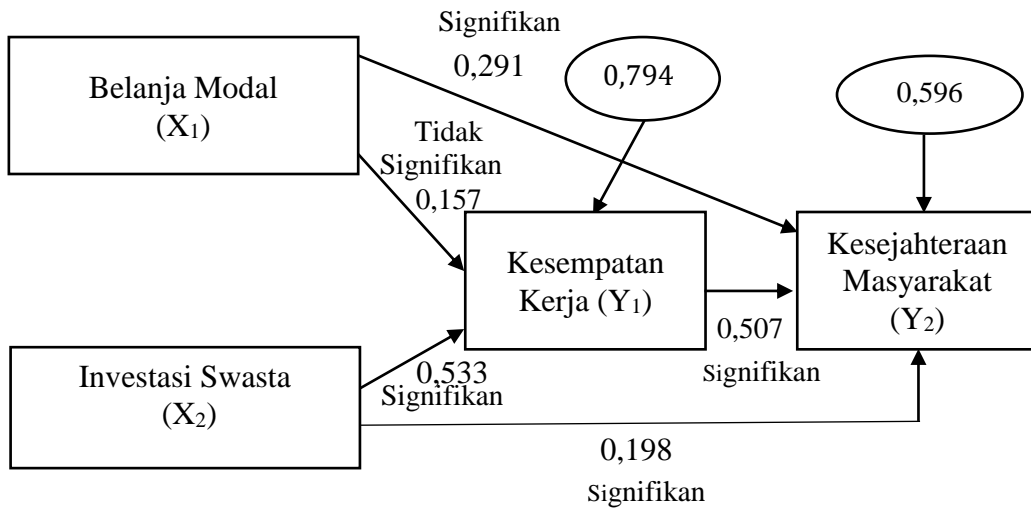
Sumber: Data diolah, 2019

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah varian variabel kesempatan kerja (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh belanja modal (X_1) dan investasi swasta (X_2), dihitung menggunakan rumus.

$$\begin{aligned}
 e_1 &= \sqrt{(1 - R_1^2)} \\
 &= \sqrt{(1 - 0,369)} \\
 &= 0,794
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh belanja modal (X_1), investasi swasta (X_2) dan kesempatan kerja (Y_1), dihitung menggunakan rumus.

$$\begin{aligned}
 e_2 &= \sqrt{(1 - R_2^2)} \\
 &= \sqrt{(1 - 0,645)} \\
 &= 0,596
 \end{aligned}$$



Gambar 1.
Diagram Analisis Jalur Penelitian

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_m^2 &= 1 - e_1^2 e_2^2 \\
 &= 1 - (0,794)^2 (0,596)^2 \\
 &= 1 - (0,630)(0,355) \\
 &= 0,78
 \end{aligned}$$

Keterangan:

R_m^2 = koefisien determinasi total.

e_1, e_2 = nilai kekeliruan taksiran standar.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 78 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 78 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 22 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,157 dengan nilai signifikansi 0,131 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lopian (2017), mendapatkan hasil yaitu variabel belanja modal dan kesempatan kerja tidak mempunyai korelasi yang signifikan, dimana setiap penambahan yang dilakukan pada alokasi belanja modal pemerintah akan menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi, atau bisa diartikan dengan adanya penambahan alokasi belanja modal maka akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar di kota Manado, meskipun apabila merujuk pada tabel signifikansi menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pemerintah kurang berpengaruh terhadap kesempatan kerja atau bisa dikatakan sudah mempunyai korelasi yang baik namun masih kurang.

Kebijakan fiskal melalui belanja modal (APBD) tidak berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja di Provinsi NTB (Sun'an dan Astuti, 2008). Hal ini disebabkan masih terfokusnya sebagian besar alokasi dana dalam APBD kepada persoalan internal pemerintah daerah setempat seperti belanja pegawai, belanja rutin daerah, belanja barang, bunga dan pengeluaran rutin lainnya. Hasil penelitian Syafaruddin (2017) menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel belanja modal terhadap kesempatan kerja. Dampak langsung aktifitas pemerintah terhadap perekonomian negara ditunjukkan oleh besar-kecilnya belanja modal pemerintah. Sehingga pengelolaan besaran belanja modal pemerintah yang tidak tepat justru akan

merugikan perekonomian. Jika belanja modal mampu menjadi pemandu peningkatan ekonomi negara, maka peningkatan pada belanja modal akan meningkatkan aktifitas perekonomian dengan adanya peningkatan investasi. Peningkatan investasi tersebut akan memiliki dampak pula pada peningkatan output, kesempatan kerja, ekspor, pajak, penerimaan pemerintah, dan transaksi berjalan (Sriyana, 2007).

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,533 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teori investasi yang dikemukakan Harrod-Domar (Mulyadi, 2002:8), yang menyatakan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Menurut penelitian Khan (1931) menjelaskan bahwa peningkatan lapangan kerja sehubungan dengan peningkatan investasi. Laila dan Sri (2011) dalam penelitian menjelaskan bahwa investasi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang baru,

karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suciati dan Budhi (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,291 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sita (2016) dan Hendarmin (2012) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Zebua (2014) dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Keterkaitan antara belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat melalui IPM sangat erat karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti perbaikan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan IPM. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah semestinya searah dengan meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. Berdasarkan

konsep IPM yang dibentuk dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Maka, pembangunan melalui belanja modal pemerintah diperlukan sebagai pendorong peningkatan IPM.

Pengalokasian belanja modal harus melalui pertimbangan, perkiraan, dan perhitungan yang panjang. Hal tersebut dikarenakan belanja modal membutuhkan biaya yang cukup besar dan pengembalian dalam jangka waktu tidak sebentar (Badrudin, 2012:65). Selain itu, Belanja modal diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halim (2014:225) menyatakan apabila pemerintah mampu menggunakan belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan akan memberikan efek multifier dalam perekonomian. Soepangat (1991:52) menyatakan bahwa peningkatan belanja modal yang menyebabkan peningkatan penyediaan layanan barang dan jasa kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya sarana prasarana dan fasilitas umum yang memadai, maka kegiatan perekonomian tidak terhambat. Hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja modal dengan mempertimbangkan secara matang dan dengan penuh perhatian agar alokasi belanja berdampak pada masyarakat. Salah satunya dengan terus meningkatkan proporsi alokasi belanja modal lebih tinggi dari belanja-belanja lainnya di struktur APBD untuk menunjang program kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,198 dengan nilai signifikansi 0,034 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh De Fretes (2007), menyebutkan bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dimana dengan adanya peningkatan investasi swasta baik itu PMDN atau PMA akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan dapat membuka peluang lapangan kerja baru.

Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suciati dan Budhi (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori investasi yang dikemukakan Harrod-Domar (dalam Mulyadi, 2002:8), yang menyatakan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat

menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,507 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hukom (2014), menyebutkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan pendapatan per kapita masyarakat meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pekerja, semakin banyak orang yang bekerja maka semakin banyak luas kesempatan kerja. terciptanya kesempatan kerja yang luas, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan memperoleh pendapatan, dimana pendapatan merupakan unsur yang terdapat pada masyarakat yang sejahtera ditunjukkan melalui IPM (Esmara, 1986). Hal ini berarti bila terjadi kenaikan kesempatan kerja maka akan meningkatkan IPM dan sebaliknya penurunan kesempatan kerja dapat menurunkan nilai IPM (Hendarmin, 2012).

Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja dapat dihitung dengan mengalikan koefisien jalur X_1 terhadap Y_1 yaitu β_1 dengan koefisien jalur Y_1 terhadap Y_2 yaitu β_5 dengan menggunakan rumus sebagai berikut.:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,026)^2(0,043)^2 + (0,065)^2(0,005)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,000676)(0,001849) + (0,004225)(0,000025)}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0012$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_1\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dengan menghitung nilai z dengan rumus sebagai berikut.

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$z = \frac{(0,065)(0,026)}{0,0012}$$

$$z = 1,41$$

Nilai z hitung sebesar $1,41 < 1,96$ berarti H_0 diterima. Dengan demikian berarti variabel belanja modal secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja dapat dihitung dengan mengalikan koefisien jalur X_2 terhadap Y_1 yaitu β_2 dengan koefisien jalur Y_1 terhadap Y_2 yaitu β_5 dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,026)^2(0,004)^2 + (0,020)^2(0,005)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,000676)(0,000016) + (0,0004)(0,000025)}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,00014$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_2\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dengan menghitung nilai z dengan rumus sebagai berikut.

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$z = \frac{(0,020)(0,026)}{0,00014}$$

$$z = 3,71$$

Nilai z hitung sebesar $3,71 > 1,96$ berarti H_0 ditolak. Dengan demikian berarti variabel investasi swasta secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain kesempatan kerja memediasi pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal, investasi swasta dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sementara itu, kesempatan kerja memediasi pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapinya dengan serius dan hati-hati khususnya dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian belanja modal agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali lebih berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada penelitian ini juga memperlihatkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya, setiap peningkatan investasi swasta juga akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, Alokasi investasi hendaknya diarahkan pada kabupaten/kota yang memiliki investasi fisik yang rendah, sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Alokasi investasi juga harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Investasi yang masuk ke kabupaten/kota di Provinsi Bali harus diarahkan ke sektor-sektor padat karya dan didistribusikan merata

di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah harus memiliki gambaran wilayah maupun sektor/lapangan usaha alokasi agar dapat dijadikan pedoman yang akurat dalam penetapan kebijakan investasi di Provinsi Bali. Di samping itu, pemerintah pun harus memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan investasi yang berpihak pada masyarakat Provinsi Bali. Dengan demikian, investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Bali secara menyeluruh melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Adams, Samuel. (2009). Can Foreign direct investment (FDI) help to promote growth in Africa. *African Journal of Business Management*. Vol.3(5), 178-183.
- Adnan, P. dan Prasetyo, Eko. (2010). Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Volume 13*. Universitas Negeri Malang.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram. Diunduh dari website :www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Asiri, Auliansyah., Arief Ardhana., Masinambow Vecky A.J dan Wauran Patrick C. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2003-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 16(3).
- Awandari, Luh Putu Putri dan Indrajaya, I Gst Bgs. (2017). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), pp: 1347-1585.
- Azhar, Arsyad. (2004). *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. *Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2018*. Juli. BPS Provinsi Bali.
- Badrudin, Rudy. (2011). Effect of Fiscal Desentralization on Capital Expenditure, Growth and Welfare. *Economic Journal of Emerging Market*. 3(3). Hal. 211-223.
- _____. (2012). *Ekonometrika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Dalamagas, Basil. (2010). Publik Sektor and Economic Growth : The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32, Hal:277-288.
- Diantari, Ni Putu dan Wirathi, I G A P.(2017). Pengaruh Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4), pp: 472-676.
- De Fretes, Pieter N. (2007). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 5(1).
- Dewi, Sakita Laksmi dan Purbadharmaja, I. B. Putu. (2013). Pengaruh PAD, PMA, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(11), h: 502- 512.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Esmara, H. (1986).*Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja Dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Fatas, Antonio dan Mihov, Ilian. (2001). The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence. *CEPR Discussion Papers* 2760.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akutansi. *Jurnal Akutansi Pemerintah*, 2(1), pp: 53-64.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Penerbit UP AMP YKPN.

- Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah & Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak. Universitas Tanjungpura. *Jurnal Eksos*, Vol (8), 144-155.
- Hukom, Alexandra. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Irvan, I Putu, dan Karmini, Ni Luh. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3), pp: 316-384.
- Janina, Seputiene. (2007). The Relation Between Social Capital, Governance and Economic Performance in Europe. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 8, No.3, 131-138.
- Kaur, M. dan Singh, L. (2016). Knowledge in the economic growth of developing economies. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 8(2), 205–212.
- Khan, R. F. (1931). The Relation Of Home Investment To Unemployment. *The Economic Journal*, 41(163), pp. 173-198.
- Krismajaya, Putu dan Martini Dewi, Ni Putu. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), pp: 1181-1442.
- Lapian, Agnes. (2017). Growth and Employment Determinants Factors in North Sulawesi Province. Faculty of Economics and Business Sam Ratulangi University Manado, Indonesia. 8(4), 2395-2210.
- Lindblad, J. Thomas. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51(2) : 217-273.
- Manuaba, I. B. Adi Sutrisna dan Kartika, I Nengah. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan. *E-Jurnal EP UNUD*, 5(9), h: 902-1010.
- Melliana, Ayunandan dan Zain, Ismaini. (2013). Analisis Atatistik Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni*

Pomits, 2(2), 237-242. 10. 12962/j23373530.v2i2.4944.

Mentari, Ni Wayan dan Mahaendra Yasa, I Nyoman. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (7), h: 778-798.

Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi DAN Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), h :1-15.

Murwanto, B. (2014). Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada kelompok Wanita Pekerja Seks dan Waria. *Jurnal Kesehatan*. 5(1). Hal 23-33.

Nehen, Ketut. (2012). *Perekonomian Indonesia*, Denpasar : Udayana University Press.

Nurudeen, Abu dan Usman, Abdullah. (2010). "Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregated Analysis" *Business and Economic Journal*, June.

Prayuda, M dan Dewi, Urmila. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Yang Berpengaruh Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali tahun 1994-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (1), h: 69-95.

Putra, M. & A, Ulupui. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alo- kasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(3). hal. 863- 877.

Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Maka- nan per kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada ter- hadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Peri- ode 2004-2012. *Piramida Unud*, 10(1), hal. 45-55.

Sita, Prima Rosita A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. 2(2), ISSN: 2460-1233.

Soepangat, Edi dan Haposan. (1991). *Penghantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sriyana, Jaka. (2007). Ketahanan Fiskal dan Prestasi Ekonomi : Kasus Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. No. 1, Juni.

Suciati, Desak dan Budhi, M. K. S. (2014). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana

Perimbangan Dan investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali tahun 2007-2012. *Buletin Studi Ekonomi*, ISSN 2580-5312.

Sucitrawati, P dan Arka, Sudarsana. (2014). Pengaruh Inflasi, Investasi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(1), h: 1-62.

Sudibia, Ketut dan Adipuryanti. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 11(1).

Syafaruddin, Munthe. (2017). Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. *Repository Institusi USU*.

Tahiri, Noor Rahman. (2017). Impact of Foreign Direct Investment on Economic of Afghanistan. *Munich Personal Repec Archive*.

Wahyuni, Putri Ayu. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 3(8).

Wijayanti, Ni Kadek Herni dan Darsana, Ida Bagus. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal EP UNUD*, 4(3), Hal: 1164-1193.

Yasa, O. A. dan Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), Hal. 63-71.

Zebua, Willman Fogati. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1)